

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah di Indonesia berdasarkan atas asas otonomi daerah dimana pembangunan mengacu pada kondisi dan situasi wilayah yang bersangkutan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk dapat mengoptimalisasi potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, sehingga bisa seminimal mungkin mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Tujuan dari otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, penerimaan daerah merupakan uang yang masuk ke kas daerah dan pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dibagi ke dalam 4 jenis pendapatan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah (Abdul Halim,2002).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah : Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terkadang dalam penetapan target nya tidak melihat besarnya potensi yang ada, akan tetapi disusun dengan menaikkan atau menurunkan sebesar persentase tertentu dari realisasi tahun sebelumnya. Sehingga hal ini belum menggambarkan kinerja yang baik dalam hal pemungutan pajak. Realisasi yang melebihi target

belum tentu mengindikasikan kinerja yang baik karena bisa saja potensi yang ada jauh melebihi target yang ditetapkan.

Hasil penelitian Widiya Astuti (2015) mengenai Kontribusi, efektivitas dan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar menyimpulkan bahwa potensi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2016 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Potensi yang ada sebenarnya adalah Rp. 36.464.571.000,00 sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 20.679.379.947,00 sehingga terjadi *potential lost* yang cukup besar Rp. 15.785.191.053,00. Hal ini menunjukkan bahwa potensi jauh lebih tinggi dari target, dikarenakan penyusunan target tidak berdasarkan potensi yang ada akan tetapi berpatokan pada realisasi tahun sebelumnya.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat dan merupakan daerah perlintasan yang strategis. Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya meningkatkan penerimaan daerahnya agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang terus dimaksimalkan adalah Pajak Hiburan.

Keberadaan hiburan di Kota Padang Panjang sangat diperlukan saat ini, disamping sebagai tempat usaha, hiburan merupakan sarana untuk menyegarkan kembali pikiran yang telah terkuras akibat pekerjaan dan studi. Minang Fantasi atau yang lebih dikenal dengan Mifan merupakan salah satu tempat hiburan yang sangat ramai dikunjungi. Pengunjung tidak hanya masyarakat dari Kota Padang Panjang, tetapi juga banyak berasal dari daerah sekitarnya seperti Kota

Bukittinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok dan daerah lainnya. Oleh karena begitu banyaknya menarik minat masyarakat untuk menggunakannya, maka dapat dikatakan bahwa hiburan dapat menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian di Kota Padang Panjang.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, penerimaan pajak hiburan cukup potensial dan memiliki jumlah realisasi yang paling besar setelah penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran. Namun, realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, bahkan cenderung dibawah target sehingga sangat memungkinkan terjadinya *potensial lost*. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan mencapai 1.022.870.000,00 sedangkan untuk tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selama periode 2011-2015 realisasi penerimaan terendah hanya mencapai Rp. 679.750.000,00 atau 67,98% dari target terjadi pada tahun 2013.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang seberapa besar potensi pajak hiburan yang masih bisa dipungut oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang dan sejauh mana potensi tersebut dapat dipungut. Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini **"Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang"**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah potensi pajak hiburan di kota Padang Panjang.

2. Bagaimana efektivitas pengelolaan pajak hiburan di Kota Padang Panjang.
3. Bagaimana kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan penelitian analisis potensi pajak hiburan di Kota Padang Panjang ini adalah :

1. Menghitung dan menganalisis besarnya potensi Pajak Hiburan di Kota Padang Panjang.
2. Menghitung efektivitas pengelolaan Pajak Hiburan di Kota Padang Panjang.
3. Menghitung dan menganalisis bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab I           Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai isi penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian ini.

#### Bab II           Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang diteliti serta penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian yang akan

digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti serta yang akan menjadi dasar analisis pada bab IV yang akan bersumber dari berbagai literatur.

Bab III Metodologi penelitian

Bab ini berisi tentang desain atau rancangan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data yang dilakukan, definisi operasional atas variabel-variabel yang ada serta metode analisis yang akan digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian serta analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari penulisan penelitian ini. Di dalam bab ini diungkapkanlah kesimpulan yang telah diperoleh dalam pembahasan sebelumnya serta disampaikan pula saran-saran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

